

---

# PARPOL ISLAM: USAHA MENUJU GOOD GOVERNANCE

Oleh: Ahmad Junaidi

Ahli Filsafat Hukum Islam pada Jurusan Syariah STAIN Jember

## Abstrak

Keberadaan umat Islam menjadi sangat penting bila dihadapkan pada keadaan bangsa Indonesia sekarang ini, khususnya mengenai Good Governance (Kepemimpinan yang baik) yang menjadi agenda mendesak bangsa Indonesia saat ini. Sejarah politik umat Islam cukup menjadi bukti, didukung oleh gagasan para pemikir Islam, serta nilai-nilai moral religius yang dikandung ajaran Islam. Partai politik Islam punya peran penting dalam membentuk Good Governance yang bebas dari KKN karena potensi konstituennya yang mendukung usaha tersebut.

**Kata Kunci:** Parpol Islam dan Good Governance

## Pendahuluan

Tumbangnyarezim Soeharto yang diawali oleh krisis ekonomi sejak pertengahan 1997 telah membuka pintu liberalisasi politik. hal ini ditandai antara lain terjadinya *euphoria* politik rakyat, yang selama hampir tiga dasawarsa pemerintahan rezim Orde Baru *termarginalisasi* dari kuatnya pengaruh kekuasaan.

Setiap kalangan mencoba mengekspresikan hak-hak dan kebebasannya yang selama pemerintahan rezim Soeharto telah direnggut secara perlahan-lahan. Ironisnya, setelah mereka memperoleh hak-haknya, mereka pun hampir tidak ada yang

concern kepada kewajiban-kewajiban politiknya atau keberpihakan secara riil kepada rakyat. Mereka lebih mengutamakan kepentingan pribadi dan kelompok dalam memperebutkan kapling kekuasaan.

Setidaknya, hal itu bisa dilihat dengan munculnya partai-partai politik di era reformasi. Dari seleksi yang diadakan, akhirnya ditetapkan sebanyak 48 partai yang layak ikut Pemilu, di mana sekitar 20 partai adalah partai Islam.

Agar tidak terjadi kekaburan dalam memaknai partai politik yang dianggap Islam manakala, *pertama*, partai yang menggunakan Islam sebagai dasar ideologi mereka, seperti PPP (partai Persatuan

Pembangunan), PBB (Partai Bulan Bintang), PPNU (Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia), PBR (Partai Bintang Reformasi), dan PKS (Partai Keadilan Sejahtera). *Kedua*, partai yang menggunakan Pancasila sebagai dasar ideologinya, tetapi pada saat yang sama juga menggunakan simbol-simbol Islam, atau sebagian besar konstituennya adalah umat Islam, seperti PKB (Partai Keadilan Bangsa) dan PAN (Partai Amanat Nasional). Partai-partai ini biasanya berhubungan erat dengan organisasi sosio-religius muslim. PKB misalnya, dapat dipastikan sebagai sayap politik Nahdlatul Ulama (NU) yang mewakili spektrum kelompok tradisional Islam Indonesia, sedangkan PAN identik dengan kelompok modernis Muhammadiyah (MD).

Dari dua kategori di atas, apabila dilihat lebih jauh, partai-partai tersebut memasukkan moral-moral agama dalam penyusunan *platform* atau penyusunan AD/ART-nya. Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya apakah munculnya begitu banyak partai bernaifaskan Islam lebih didorong oleh keinginan para elite muslim untuk mendapatkan kekuasaan ataukah didorong oleh alasan-alasan yang murni keagamaan. Untuk menarik garis lurus di antara perdebatan tersebut diperlukan refleksi historis dari sejarah politik umat Islam ke depan untuk memecahkan masalah-masalah krusial umat Islam, khususnya masalah pentingnya *Good Governance* yang menjadi agenda mendesak bangsa In-

donesia saat ini.

### ***Good Governance* dalam Sejarah Umat Islam**

Untuk menelusuri moral politik Islam tentunya tidak bisa dilepaskan dari sejarah umat Islam itu sendiri. Sejarah umat Islam terkait erat dengan peristiwa-peristiwa politik. Tanpa terjebak dalam romantisme sejarah, sejarah telah mencatat bahwa masa-masa awal umat Islam merupakan torehan emas bagi sejarah perpolitikan umat Islam.

Pada masa yang disebut Khilafah al-Rhoidin setidaknya-tidaknya ada tiga hal yang menjadi ciri khas politik umat Islam yaitu sistem pemilihan khalifah, pertanggungjawaban jabatan khalifah dan sistem musyawarah.

#### **a. Sistem Pemilihan Khalifah**

Sistem khilafah pertama kali dibentuk dengan dinobatkannya Abu Bakar sebagai khalifah. Bahwa Nabi Muhammad tidak meninggalkan anak laki-laki, Nabi juga tidak menunjukkan seseorang sebagai penggantinya sebagai pimpinan republik Islam kelak. Sedangkan kepentingan akan kepemimpinan untuk menegakkan kesatuan umat Islam dan stabilitas negara mutlak diperlukan. Semula tidak seorangpun menaruh perhatian terhadap kepentingan ini. Namun sepeninggal Nabi Muhammad kesadaran akan pentingnya pengganti pimpinan Islam segera timbul. Pada saat itu kelompok masyarakat Anshar menyelenggarakan musyawarah nasional

untuk memilih seorang pemimpin pengganti kepemimpinan Nabi Muhammad. Setelah berlangsung perdebatan serius, akhirnya tercapai kesepakatan memilih dan menobatkan Abu Bakar sebagai pimpinan (penerus) Nabi Muhammad. Jadi pemilihan Abu Bakar terjadi secara tiba-tiba tanpa adanya rekayasa sebelumnya. Sekalipun Abu Bakar terpilih dalam musyawarah yang hanya melibatkan sebagian kecil tokoh muslim, namun pada hari berikutnya hasil keputusan tersebut dikukuhkan dalam pertemuan yang lebih besar di masjid Madinah dimana masyarakat muslim menyatakan kesempatan secara langsung dalam menyampaikan *bai'at* kepadanya. cara pemilihan seperti ini dijadikan teladan pada beberapa khalifah berikutnya.

Pola pemerintahan khilafah al-rashidin yang paling penting adalah mengenai sistem pengangkatan khalifah. Keempat khalifah al-Rashidin dipilih melalui cara yang hampir sama yakni permusyawaratan. Pola pemilihan tersebut dapat dikategorikan sebagai pemilihan langsung yang terdiri dari dua tahap pemilihan. Tahap pertama adalah pemilihan figur khalifah itu sendiri, sedangkan tahap kedua adalah pengukuhan keabsahan khalifah terpilih melalui *bai'at* (janji kesetiaan) oleh seluruh umat Islam yang hadir.

Pemilihan tahap pertama, biasanya hanya melibatkan tokoh-tokoh sahabat (elit) untuk mengusulkan dan memilih calon khalifah. Misalnya Abu Bakar dicalonkan

menjadi khalifah oleh Umar dan Abu Ubaidah; sementara khalifah Umar sendiri diusulkan oleh Abu Bakar; Usman dicalonkan oleh Umar, Abdur Rahman Bin Auf dan anggota pemilihan yang lainnya, sedangkan Ali diusulkan oleh gerombolan pemberontak dan oleh tokoh-tokoh musyawarah di Madinah. Dalam hal ini pemilihan khalifah dilakukan oleh para sahabat besar dan tokoh-tokoh masyarakat bertindak sebagai dewan pemilihan atau sebagai dewan permusyawaratan. Dalam setiap proses pemilihan tersebut biasanya mereka berhasil mencapai kesepakatan bulat.

Demikianlah cara pemilihan khalifah yang berlaku pada saat itu bagi mereka yang semula tidak sepekat atas figur khalifah, harus menerima keputusan penetapan khalifah setelah hasil pemilihan tersebut diberlakukan, Ali pun menerimanya sebagai khalifah bahkan mendukung segala kebijakannya. Pada masa awal-awal Islam ini tidak terdapat kelompok oposisi. Semua masyarakat bersatu dan bersepakat mendukung khalifah yang terpilih. Setelah masyarakat muslim menyampaikan *bai'at* khalifah terpilih, biasanya, dipersilahkan menyampaikan pidato penobatan atau pengukuhan untuk menyampaikan garis-garis besar kebijakan politik yang akan ditempuh selama masa pemerintahannya.

#### **b. Pertanggungjawaban Jabatan Khalifah**

Khalifah adalah jabatan kepala tertinggi pemerintahan imperium Islam

yang dipilih oleh rakyat melalui musyawarah. Sekalipun pada saat itu belum terdapat konstitusi yang membatasi kekuasaan seorang khalifah, tidak berarti bahwa kewenangan khalifah tidak terbatas. Seorang khalifah wajib menyelenggarakan kewenangannya sesuai petunjuk Al-Qur'an dan Sunnah. Dan Bagi khalifah belakangan juga harus mengikuti kebijakan khalifah pendahulunya selama kebijakan tersebut masih relevan dengan kebutuhan umat pada masanya. Dalam konteks ini dapat dimengerti bahwa sistem pertanggungjawaban seorang khalifah itu ditujukan pertama-tama kepada moral keagamaan yakni al-Qur'an dan al-Hadits, dan kepada umat Islam secara umum.

### c. Sistem Musyawarah

Sistem permusyawaratan merupakan gambaran yang paling menonjol dalam pemerintahan khilafah al-rasyidun. Lembaga yang menjalankan fungsi permusyawaratan ini dinamakan majelis syuro. Khilafah menyelenggarakan musyawarah dalam segala urusan kenegaraan. Lembaga ini merupakan perwujudan dari perintah dan ajaran Al-Qur'an. Dalam konteks sekarang ini, sistem perpolitikan yang telah diterapkan umat Islam saat itu dapat dikategorikan ke dalam sistem politik yang demokratis di mana salah satu intinya adalah musyawarah. Sudah barang tentu dalam permusyawaratan ini kebebasan berpendapat sangat dihormati, namun demikian kesepakatan untuk menjunjung

tinggi hasil musyawarahpun harus ditaati oleh setiap peserta.

### Kehidupan Sosial di Masa Khilafah al-Rashidin

Khalifah al-Rashidin menjalani kehidupan sederhana dan bersifat terbuka. Sekalipun wilayah kekuasaan Islam semakin bertambah luas dan negara pun semakin bertambah kaya, namun tidak seorangpun diantara khalifah yang empat ini yang terlibat dalam kemewahan hidup. Mereka tidak ada yang membangun istana kerajaan, tidak menyediakan gedung megah untuk perkantoran, melainkan dengan hanya tinggal di perkampungan sebagaimana rakyat umumnya.

Di rumah mereka masing-masing, para khalifah tinggal dan menjalankan tugas-tugas kesehariannya. Mereka tidak malu mengerjakan pekerjaan rumah sendiri, dan tidak merasa perlu memasang pengawal untuk menjaga keamanan rumah dan dirinya, sekalipun seberapa besar mereka terancam oleh tajamnya mata pedang musuh. Rumah mereka terbuka untuk umum, terlebih untuk rakyat miskin, dan mereka selalu berkenan mendengarkan pengaduan rakyat. Mereka menerima gaji tertentu dari harta kekayaan negara untuk menafkahi hidup keluarganya, sepanjuang waktu hati dan jiwa mereka diabdikan kepada Allah dan kepada sesama manusia.

Sebelumnya, masyarakat Arabia telah terbiasa dengan minum-minuman keras, perjudian dan kehidupan yang mewah. Setelah pemerintahan Islam tegak

---

dan berkat keteladanan para khalifah mereka meninggalkan kebiasaan buruk tersebut berganti dengan kehidupan yang bersih dan benar sesuai tuntunan agama.

Posisi wanita berubah semakin membaik. Mereka berhak menikmati hak-hak khusus terhadap kekayaan ayah dan suaminya. Mereka memiliki hak memilih dan menentukan pasangan hidupnya. Mereka dibebaskan tampil di muka umum dan menghadiri pidato sang khalifah, bahkan mereka diizinkan turut berperang dalam medan peperangan. Kebiasaan poligami yang menyengsarakan pihak isteri dibatasi dengan berbagai aturan dan persyaratan yang mendukung perlindungan hak-hak isteri. Sistem perbudakan dihapuskan. Kebijakan khalifah memperlakukan budak secara mulia dan adil. Kedudukan mereka berubah total selama masa pemerintahan ini. Singkatnya, deskriminasi dan marginalisasi perempuan semakin dapat direduksi. Pada saat bersamaan, struktur sosial yang bias gender (*gender biased*) dapat ditegakkan, sehingga sistem kehidupan pun berubah semakin demokratis.

Dengan memperhatikan hal-hal di atas, tanpa keraguan sedikitpun dikatakan bahwa masa pemerintahan khilafah al-Rashidin yang bercorak republik dan demokratis ini merupakan masa-masa emas dan masa terpenting dalam sejarah Islam. Sekalipun dalam rentang waktu yang relatif pendek karya bakti mereka tetap diakui sebagai karya yang gemilang dalam catatan sejarah umat manusia.

### Negara Menurut Ibnu Taimiyah

Menurut Ibnu Taimiyah menegakkan negara bukanlah asas atau tujuan agama dan bukan pula sebagai sebuah pelengkap yang diperlukan oleh agama. Yang penting mereka harus berjuang untuk menjadi pihak mayoritas dimanapun kebetulan mereka berada sehingga mereka dapat mengubah tata sosial di tempat itu sesuai dengan ideologi mereka. Ibnu Taimiyah tidak dapat menerima suatu situasi dimana orang-orang meuslim hidup merdeka tetapi tidak sanggup mengendalikan tata sosial ditempat mereka.

Demi hukum dan ketertiban Ibnu Taimiyah bersedia mendukung bentuk pemerintahan yang seburuk-buruknya bahkan ia lebih senang kepada pemerintahan kafir dari pada kekacauan, ia benar-benar meyakini bahwa organisasi politik adalah suatu keharusan bagi umat manusia, suatu keharusan mutlak agar Islam dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Pemimpin negara adalah bayangan Allah di atas bumi di mana berlindung semua makhluknya-makhluk-Nya.

Negara bukanlah masalah iman walaupun sangat diperlukan. Yang penting bagi Ibnu Taymiyyah adalah berdirinya sebuah Negara yang berfungsi sebagai pedang agama. Tetapi bagaimanakah Negara itu tercipta dan bagaimanakah bentuknya tidak menjadi persoalan baginya. Ibnu Taymiyyah mengemukakan dalam kata-katanya yang pedas terhadap orang-orang Syi'ah dan para filosof bahwa

agama janglah direndahkan menjadi semacam sistem politik semata-mata, karena walaupun politik memang penting untuk agama tetapi ia bukanlah agama. Oleh karena kepercayaan kepada Allah dan Rasul-Nya lebih penting dari pada menegakkan *Imamah* (Ibnu Taimiyah, 1321:17).

Jadi Ibnu Taimiyah tidak menyangkal betapa negara perlu ditegakkan di dalam Islam. Bahkan ia membuktikan bahwa negara adalah sangat penting, tetapi negara itu harus dinamis dan progresif di dalam sifat dan konstitusinya. Ibnu Taymiyyah dalam waktu yang bersamaan menyerang golongan Sunni dan Syi'ah karena menurut dia baik teori khilafah yang tradisional maupun teori yang menyatakan bahwa menegakkan imamah merupakan kewajiban agama tidak mempunyai dasar baik di dalam al-Qur'an maupun Sunnah. Ibnu Taymiyyah melihat Islam sebagai sebuah tata sosial di mana hukum Allah berkuasa.

Oleh karena itu ia sama sekali tidak merasa berkepentingan dengan negara dan bentuk negara, ia hanya menerima negara sebagai suatu hal yang perlu bagi agama. dengan perkataan lain ia berpendapat bahwa setiap bentuk pemerintahan dimana syari'ah merupakan otoritas tertinggi akan membutuhkan negara yang diatur sesuai dengan Islam. Demikian juga Muhammad SAW tidak pernah sekalipun mengatakan bahwa menegakkan otoritas politik adalah salah satu di antara tugas-tugasnya.

Dari semua ini dapatlah ditarik

kesimpulan bahwa teori konstitusional Islam tidak dapat dibuat berdasarkan tindakan-tindakan politis yang pernah dilakukan Nabi. Jadi menurut Ibnu Taymiyyah praktek-praktek yang telah dilakukan kaum muslimin di dalam sejarah tidak dapat dijadikan landasan filsafat politik, maka dari itu teori klasik mengenai kekhalifahan ditolakny, ia sama sekali tidak peduli terhadap bentuk dan pola pemerintahan. Bagi Ibnu Taymiyyah, mengajukan sebuah teori konstitusional yang permanet bagi dunia Islam adalah tidak realistis dan tidak dapat dilaksanakan.

### **Partai dalam Konsep Umat Islam Indonesia**

Bagi umat Islam partai adalah wadah untuk menyalurkan aspirasi atau wadah dalam upaya penerapan hukum-hukum dan tatanan yang diyakini kebenarannya, lebih jauh lagi bingkai kebenaran yang mutlak bagi umat Islam adalah kebenaran wahyu. Sebuah partai, bagi umat Islam, harus berdasarkan beberapa konsep yang diantaranya.

*Pertama*, partai harus dibangun sesuai dengan hatinurani para pendiri dan basisi pendukungnya, bila pendukungnya ulama maka bangunan landasan partai tu sesuai dengan hati nurani ulama. Karakteristik yang ditampilkan adalah karakteristik ulama.

*Kedua*, partai itu harus membangun masa depan, masa depan tidak sekedar menghadapi masa depan yang hakiki, yaitu keselamatan dunia akhirat.

*Ketiga*, partai harus dibanun dengan kejujuran dan menjauhkan peripuan, tidak dibenarkan membohongi rakyat, membodohi rakyat. Rakyat hanya dijadikan alat untuk uang dan kekuasaan.

*Keempat*, partai harus dipimpin oleh orang-orang yang mempunyai ilmu agama dan amanah karena orang-orang inilah yang mampu menjalankan risalah untuk kepentingan umat. Kalau partai dipimpin oleh orang-orang yang *jahlun fi al-din* dan khianat maka dapat dikhawatirkan kerusakan akan merajalela dan hukum diperjualbelikan bahkan yang diterapkan adalah hukum rimba.

Gambaran partai politik seperti inilah yang diharapkan dapat memberik wawasan, bahwa partai itu tidak hanya sekedar memberi atau memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai kebangsaan dan nilai-nilai kerukunan antar umat beragama, namun lebih dari itu ia juga menampilkan nilai-nilai religi karena di dalamnya semua nilai tercakup.

### **Masalah Indonesia Yang Paling Mendasar**

Permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia yang paling mendasar adalah bagaimana upaya agar seluruh lapisan masyarakat dan penduduk bangsa Indonesia merasa bahwa negeri dan negara Indonesia (termasuk undang-undang dasarnya) ini kepunyaan bersama mereka semua dan bukan hanya milik sekelompok golongan tertentu yang kebetulan berkuasa dan

memerintah pada masa tertentu.

Hal ini dapat terlaksana hanya apabila seluruh lapisan masyarakat Indonesia dengan jujur dan ikhlas menerima pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 serta Dekrit Presiden 5 Juli 1959 (dengan segala konsiderans dan diktumnya) yang telah memberlakukan Pembukaan dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar tersebut. Kemudian dengan jujur dan ikhlas pula melaksanakannya secara konsisten dan konsekuen.

Ada hal yang menarik dalam sebuah paragraf penjelasan resmi Undang-Undang Dasar 1945, untuk direnungkan bersama dengan seksama:

*"Yang penting dalam pemerintahan dan dalam hal hidup negara ialah semangat para pemimpin pemerintahan. Meskipun di bikin undang-undang dasar yang menurut kata-katanya bersifat kekeluargaan, apabila semangat para penyelenggara negara itu bersifat perseorangan, undang-undang dasar tadi tentu tidak ada artinya dalam praktek. Sebaliknya meskipun undang-undang dasar itu tidak sempurna, akan tetapi jika semangat para penyelenggara pemerintahan baik, undang-undang dasar itu tentu tidak akan merintang jalannya negara. Jadi yang paling penting adalah semangat. (Simorangkir, 1959:19)*

### **Sumber Krisis di Indonesia Adalah KKN**

Pada dasarnya krisis ekonomi dan moneter yang sekarang tengah melanda

negara Indonesia bermula dari menurunnya nilai tukar rupiah dan krisis perbankan nasional pada permulaan tahun 1997. Kedua hal tersebut terjadi dengan cepat dan tiba-tiba, sehingga memicu kepanikan serta mengakibatkan penarikan besar-besaran dana masyarakat dari bank-bank yang ada. Disusul kemudian dengan naiknya harga-harga kebutuhan bahan pokok, mencapai hingga tiga sampai empat kali lipat.

Akibatnya terjadi kelangkaan berbagai barang kebutuhan pokok, perusahaan-perusahaan banyak yang jatuh bangkrut, karyawan-karyawan banyak yang kena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Kepanikan muncul di mana-mana. Mahasiswa di seluruh Indonesia yang selama ini dikekang oleh Orde Baru segera bangkit, hampir setiap hari mereka melakukan demonstrasi. Rakyat yang selama bertahun-tahun berada dalam tekanan ketakutan di bawah bayang-bayang ancaman rezim otoriter Soeharto mulai berani melawan. Mereka bangkit dan bergerak bersama.

Dimana-mana terjadi demo dan puncaknya terjadi pada pertengahan Mei 1998, dimana waktu itu puluhan ribu mahasiswa berhasil menduduki kantor DPR/MPR selama sehari-hari, mereka menuntut Soeharto segera mundur dari jabatan presiden. Aksi itu akhirnya berhasil memaksa Soeharto meletakkan jabatannya sebagai presiden pada 21 Mei 1998.

Timbul ketimpangan sosial, dimana yang kaya makin bertambah kaya dan yang

miskin semakin miskin. Akumulasi KKN yang dilakukan pihak pemerintah ORBA selama kurang lebih tiga puluh tahun itulah yang akhirnya berbuah krisis di tahun 1997, dan masih menjerat hingga sekarang ini. Bermula dari krisis ekonomi, kemudian merembet ke berbagai bidang kehidupan, sehingga bangsa Indonesia terjerembab ke dalam apa yang disebut dengan krisis multi dimensi

### **Bangsa Yang Berbudaya KKN**

Sebenarnya diwaktu yang hampir bersamaan, yaitu ditahun 1997 krisis ekonomi juga melanda beberapa negara tetangga seperti Thailand, Malaysia dan Korea Selatan. Tetapi berbeda dengan Indonesia ketiga negara tersebut segera melakukan pemberantasan secara sungguh-sungguh terhadap semua praktek KKN, beberapa pejabat mereka yang terlibat KKN segera dijatuhi hukuman berat sehingga pada tahun 1999 Thailand dan Korea Selatan sudah terbebas dari krisis bahkan Malaysia hariya mengalami krisis selama setahun.

Sementara untuk kasus Indonesia sampai memasuki tahun ketujuh ini, belum ada sedikitpun tanda-tanda akan bebas dari krisis, semua masih serba semrawut, bahkan praktek KKN merajalela hingga ke arus bawah, budaya suap dan upeti oleh sebagian orang sudah dianggap bukan lagi menjadi barang yang tabu. Padahal hal itulah yang menjadi penyebab krisis. Disisi lain para pemimpin bukannya memikirkan masa depan bangsa, mereka leibh asyik

bermain politik untuk berebut dan mempertahankan kekuasaan.

Megawati, yang diharapkan bekerja keras untuk membebaskan negeri ini dari jerat korupsi ternyata kurang memiliki kemampuan untuk menyelesaikannya secara maksimal, ia lebih sibuk menyelematkan agenda politiknya dari pada benar-benar berkonsentrasi menyelamatkan negeri ini, terbukti selama kepemimpinannya hampir tidak ada koruptor yang dijera secara hukum. Malah pada tahun 2003 selaku presiden dia mengeluarkan surat yang intinya membebaskan beberapa koruptor yang terlibat dalam penggarangan dana BLBI dari segala tuntutan hukum.

Indonesia adalah Negara yang telah mendapatkan penghargaan dari *Transparency International* (TI) yang bermarkas di Berlin, sebagai negara terkorup nomor 6 di dunia pada tahun ini, lebih baik dari pada tahun lalu yang berada di tingkat 4 dari 133 negara yang diteliti, sebuah penghargaan yang memalukan bagi bangsa yang bangga berpenduduk muslim terbesar di dunia ditengah lesunya dukungan pemerintah terhadap gerakan-gerakan anti korupsi. Indikasi tersebut bisa dilihat dari ketakutan presiden Megawati untuk menindak tegas pelaku korupsi, bahkan di topengi dengan ketakutan melanggar HM bila menindak tegas para koruptor.

Ironisnya, memang korupsi saat ini telah memasyarakat kalau tidak boleh mengatakan menjadi budaya bangsa Indonesia. Sementara itu para sosiolog sepakat

dalam memahami "budaya", selain budaya dianggap sebagai produk masyarakat, juga dianggap sebagai sebuah perspektif masyarakat untuk menapaki kehidupan sehari-hari. Nah, bila kemudian korupsi itu benar-benar telah menjadi "budaya" berarti memang inilah realitas produk masyarakat dan cara pandang masyarakat kita. Jadi kalau ada kesimpulan (konklusi) bahwa kondisi seluruh elemen negeri, baik masyarakat, DPR, intelektual, birokrasi maupun tokoh-tokohnya sedang "sakit", maka hal itu dapat dibenarkan. Oleh karena itu kondisi seperti ini harus segera disembuhkan.

#### KKN Menurut Hukum Islam

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam hukum Islam disebut dengan *al-Riswah*. Dalam kasus penyuapan pelakunya disebut *al-Râsi* dan penerima suapnya disebut dengan *al-Murtasi*. Didasarkan pada hadits Nabi SAW yang artinya :

Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Allah melaknat orang yang menyap dan yang menerima suap" Hadits riwayat al-Khamsah kecuali al-Nasa'i. (Dâr al-Fikr, 300:tt)

Hadits ini menyatakan larangan terhadap praktek suap (KKN), dengan ancaman laknat Allah bagi orang yang melakukannya. Menurut kajian usul fiqh 'illat dari hadits ini adalah *tadyi'u al-huqûq* atau menghilangkan hak-hak orang lain. Dalam suatu kesempatan yang

seharusnya menjadi hak banyak serta seharusnya diperebutkan secara fair, melalui proses yang transparan dengan kompetisi yang sehat, kemudian di sisi lain ada pihak-pihak yang tidak mengikuti aturan main baik itu dengan cara kolusi, neptisme, rekomendasi, katabelece dan sebagainya yang bertujuan untuk menutup kesempatan orang lain yang juga ikut berhak, maka orang tersebut menurut 'illat dari hadits hukum ini termasuk dalam ancaman hadits di atas. Adapun status dari gaji yang diperoleh melalui KKN tersebut ada yang mengatakan haram (Aula, 2002)

### Membasmi Korupsi Melalui Gerakan Politik

Namun bila kemudian kita meneyandarkan harap yang besar upaya pemberantasan korupsi dengan menegakkan hukum di Indonesia mungkin kita akan sangat kecewa. Kita sudah mafhum, penegakan hukum di negeri jamrud katulistiwa ini masih belum bisa menyentuh pelanggaran-pelanggaran hukum kelas kakap, walaupun ada kuantitasnya masih sangat sedikit, indikasinya sampai saat ini masih banyak berkeliaran para koruptor baik dikancah politik, pemerintah maupun bisnis.

Ditengah pesimisnya kita terhadap gerakan *rule of law* (penegakkan hukum) inilah maka adanya deklarasi yang diteruskan dengan gerakan anti korupsi yang dilakukan oleh dua ormas terbesar negeri ini (NU-Muhammadiyah) merupakan sebuah titik cahaya harapan yang wajib kita dukung bersama-sama. Titik cahaya ini

mengandung resiko yang sangat besar, jika gerakan ini nantinya gagal. Dapat diestimasikan orams-orams atau LSM-LSM lain yang lebih kecil akan merasa minder untuk ikut memerangi korupsi.

Upaya pemberantasan korupsi ini dapat dianggap sebagai salah satu prasyarat utama dalam mewujudkan *Good Governance*, pemerintahan yang baik, yang didalamnya ada sinergitas antara negara, masyarakat dan kalangan swasta. Tentu disini yang dibangun tidak hanya bersih (*clean*) ditingkatan struktural negara (baca: birokrasi) tetapi juga dukungan masyarakat dan kalangan swasta untuk tidak ikut mendukung budaya korupsi karena praktek korupsi negeri ini merupakan perpaduan dari ketiga unsur tersebut. Birokrasi tidak akan korup kalau lingkungan masyarakatnya tidak mendukung praktek-praktek korup di level atas.

Partai Islam yang punya anggota berpuluh-puluh juta diharapkan mampu mendorong gerakan anti korupsi menjadi gerakan *snow ball* (bola salju) gerakan anti korupsi yang terus menggelinding dan digelindingkan. Paling tidak bila konstituen partai politik Islam melakukan gerakan ini yang kemudian didukung oleh seluruh rakyat Indonesia maka teori Mao "desa mengepung kota" (tekanan) rakyat yang anti korupsi mengepung birokrasi dan sekelilingnya dengan *presurre* (tekanan) moral dan budaya. Sehingga tidak ada lagi toleransi terhadap pelaku-pelaku korup, termasuk atas nama HAM sekalipun. Karena koruptor adalah penjahat HAM,

penggarong uang rakyat. Untuk itu, partai Islam hendaknya berbenah diri dalam melakukan gerakan politik yang lebih berpihak kepada kepentingan rakyat, salah satunya adalah pemberantasan KKN. Bukan sebaliknya, banyak dari tokoh-tokoh dari partai Islam yang justru masuk terjebak dalam lingkaran setan tersebut, yakni ikut berpartisipasi menyukseskan KKN. Ada yang mengatakan pula bahwa tidak sedikit dari aktivis partai politik Islam yang masuk dalam kategori politisi busuk. Kondisi semacam ini jelas harus dikoreksi oleh elit-elit politik Islam, kalau tidak, partai politik Islam akan semakin ditinggalkan oleh kostituennya. Sebab, umat Islam sekarang ini sudah semakin kritis dan cerdas dalam menyikapi semua fenomena yang ada.

Kita tidak usah malu meniru China menindas tegas koruptor-koruptornya, walaupun *finishing touch* (sentuhan akhir)nya mungkin beda. Kalau di China langsung dihukum mati, tetapi di Indonesia bisa jadi tidak. Namun substansinya haruslah tetap sama bahwa perlu upaya tegas menindak para koruptor. Karena kejahatan korupsi adalah kejahatan kemanusiaan yang merugikan rakyat banyak.

Upaya penegakan ini tidak akan berhasil bila rakyat tidak ikut mengontrol dan mengawasinya, karena itulah di tingkatan publik perlu dicerahkan dan didasarkan, bahwa korupsi disegala tingkatan adalah upaya pengingkaran martabat kemanusiaan. Nah disinilah pentingnya peran partai politik Islam dalam mewujudkan budaya clean

masyarakat sebagai sebuah hal yang mesti di gaungkan dan diimplementasikan oleh seluruh elemen publik. Sebagai upaya menandingin budaya korupsi yang kian hari kian menjamur dan menggurita. Untuk mencerahkan publik perlu dikembangkan kritisme di kalangan masyarakat sehingga masyarakat tidak hana diam saja ketika ditindas oleh gurita korupsi yang dilakukan oleh para elite politik, negara maupun bisnis. Masyarakat harus sadar untuk mengkritis ini di tengah hilangnya tauladan pemimpin untuk membasmi korupsi, bahkan banyak elite-elite tersebut merupakan lingkaran setan pelaku korupsi itu sendiri. *We must aware!*

#### Daftar Pustaka

- Ali, Prof. K, *Sejarah Islam (Tarikh Pramodern)*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1996
- Azra, Azyumardi, "Faktor Islam di Indonesia Pasca Soeharto", dalam Chirs Manning dan Diermen, Peter Van (ed) *Indonesia di Tengah Transisi, Aspek-aspek Sosial reformasi dna Krisis*, Yogyakarta: LKiS, 2000
- Khûlî Muhammad 'Abd al-'Aziz al, *Al-Adab al Nabawî*, Dâr al-Fikr, tt
- Majalah AULA No. 02 Tahun XXIV Pebruari 2002

